



Pendidikan Politik PKS dan Demokrat Dalam Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi Pada Pemilu 2024

Amanda Vellya Putri^{1*}, Lince Magriasti²

¹² Universitas Negeri Padang

Abstract: Keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif sangat dibutuhkan dalam memberikan pendapat pada proses serta terbentuknya suatu peraturan maupun kebijakan yang berkaitan dengan kaum perempuan. Pendidikan politik bagi perempuan dapat digunakan sebagai cara mengoptimalkan keterlibatan politiknya secara internal partai dan pada pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pendidikan politik PKS dan Demokrat, menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik PKS dan Demokrat serta strategi PKS dan Demokrat dalam meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi pada Pemilu 2024. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan didasarkan pada metode purposive dan teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan konklusi. Hasil studi menjelaskan bahwasanya PKS memiliki kegiatan lebih variatif dan terstruktur dibandingkan dengan kegiatan Partai Demokrat yang berupa pemanfaatan momen-momen pada acara tertentu. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan internal berupa, keterbatasan sumber daya, Ketidajelasan target, Kurangnya komitmen dan koordinasi. Hambatan eksternal yang meliputi, sikap apatis masyarakat, ekonomi masyarakat yang rendah serta pendidikan dan budaya. Strategi PKS dan Demokrat dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD mulai dari, nomor urut awal, strategi pemenangan, pelibatan kader pada kegiatan partai, sistem rekrutmen yang baik, serta pendidikan politik bagi perempuan.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Partai Keadian Sejahtera, Partai Demokrat, Keterwakilan Perempuan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1925>

*Correspondence: Amanda Vellya Putri

Email: amandavellyaputri@gmail.com

Received: 21-10-2024

Accepted: 21-11-2024

Published: 22-12-2024



Copyright: © 2024

Abstract: Women's representation in the legislature is needed in providing opinions on the process and formation of regulations and policies related to women. Political education for women can be used as a way to optimise their political involvement internally in the party and in government. This study aims to analyse the forms of political education of PKS and Democrats, analyse the obstacles in the implementation of PKS and Democrat political education and PKS and Democrat strategies in increasing Women's Representation in the Bukittinggi City DPRD in the 2024 Election. This type of research is qualitative research with descriptive methods with data collection techniques in the form of interviews and documentation studies. The selection of informants is based on a purposive method and data analysis techniques are carried out through collection, reduction, presentation and conclusion drawing. The study results explain that PKS has more varied and structured activities compared to the activities of the Democratic Party in the form of utilising moments at certain events. However, in its implementation there are internal obstacles in the form of limited resources, unclear targets, lack of commitment and coordination. External barriers include community apathy, low community economy, education and culture. PKS and Democrat strategies in increasing women's representation in DPRD start from the initial serial numbers, winning strategies, involving cadres in party activities, a good recruitment system, and political education for women.

Keywords: Political education, Prosperous Justice Party (PKS), Democratic Party (Demokrat), Women's representation

Pendahuluan

Partai politik merupakan sebuah lembaga perwujudan terlaksananya sistem demokrasi di Indonesia. Pada kegiatan pemilu partai politik memiliki peran utama sebagai tempat edukasi politik serta sebagai lembaga kadernisasi para calon pemimpin atau penjabat pemerintahan di Indonesia baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Berdasarkan Budiardjo, partai politik merupakan sebuah organisasi dengan anggota memiliki pandangan, nilai serta kesamaan cita-cita yang bertujuan mendapatkan posisi dan kuasa per politik agar dapat menjalankan program atau kebijakan yang telah dibuat (Labolo & Ilham, 2015).

UU No 2 Tahun 2011 terkait partai politik menjelaskan bahwasanya termasuk di antara fungsi partai politik merupakan media dan wadah edukasi politik untuk masyarakat sehingga paham dan sadar terhadap beserta keharusannya baik secara sosial dan juga bernegara. Menurut Kartono (1989:45 dalam Sumanto & Haryanti, 2021), menjelaskan bahwasanya pendidikan politik ditujukan untuk manusia dewasa terutama kalangan muda melalui cara pembentukan kader politik sebagai sumber daya untuk menjawab permasalahan politik melaksanakan kompetensi dan juga memperjuangkan cita-cita.

Pendidikan politik sebagai media dapat berpengaruh, menjadikan adanya perubahan dan pembentukan sikap serta tingkah laku sesuai dengan pandangan bermanfaat dan benar untuk masyarakat. Pendidikan politik dari partai dapat bermanfaat secara optimal jika kepentingan di dalamnya mampu menstimulasi kepentingan secara nasional dan menjadi pilar untuk masyarakat yang demokratis, transparan memiliki akun stabilitas dan dapat memberikan kebermanfaatan untuk bangsa serta masyarakat. Pembentukan partai dengan tujuan dapat menciptakan ketertiban dan kebermanfaatan untuk budaya perpolitikan. Sistem pengkaderan yang dilaksanakan oleh partai politik merupakan salah satu kegiatan untuk menghasilkan pemimpin yang memiliki kehormatan, keadaban serta kemampuan dalam memimpin rakyat (Yuliana et al., 2022).

Tujuan akhir pendidikan politik yaitu peningkatan keterlibatan kader untuk terjun pada politik praktis. Selain untuk membentuk kader yang loyal terhadap partai, pendidikan tersebut juga bertujuan sebagai cara pembentukan sikap Arif dan bijak serta negarawan untuk menghadapi persoalan kebangsaan. Pendidikan tersebut juga berdampak signifikan untuk membentuk karakter kader sehingga lebih sadar dan bersedia terlibat aktif dalam tata politik praktis dan sirkulasi kekuasaan. Hal ini juga ditujukan untuk kader partai perempuan yang bisa dijadikan sebagai suatu batu loncatan dalam hal mengembangkan keterlibatan aktif kader-kader perempuan secara internal kepercayaan dan juga pemerintahan. (Heriyanti et al., 2018).

Seiring perkembangan zaman partisipasi perempuan dalam bidang politik mulai menjadi pembicaraan penting. Keikutsertaan perempuan pada ranah perpolitikan dapat menghadirkan pendapat secara komprehensif untuk pembentukan regulasi ataupun kebijakan berkaitan dengan kaum perempuan, karena dianggap lebih mengetahui tentang hal-hal khusus yang dibutuhkan dan hal ini hanya dapat dimengerti oleh perempuan. (Hevriansyah, 2021). Pasal 2 ayat 2 UU No 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwasanya dalam pembentukan dan pendirian maka partai politik wajib memasukkan 30% partisipasi perempuan (Kadir & Safriani, 2021).

Berdasarkan hasil pemilu pada tahun 2024 terdapat peningkatan pada jumlah keterwakilan perempuan untuk tingkat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2019 dari 65 kursi terdapat 4 kursi (6%) wakil perempuan, sedangkan pada tahun 2024 jumlah wakil perempuan meningkat menjadi 10 kursi (15%) dari 65 kursi total keseluruhan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jumlah keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif tingkat provinsi saat ini tergolong masih rendah karena masih belum memenuhi 30 % syarat keterwakilan perempuan (White, 2023).

Pada tingkat kab/kota, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi juga mengalami peningkatan. Total keseluruhan anggota DPRD Kota Bukittinggi sebanyak 25 kursi yang mana 17 kursi (68%) diperoleh oleh calon anggota DPRD laki-laki dan sebanyak 8 kursi (32%) untuk calon anggota DPRD perempuan. Jika dibandingkan dengan hasil pemilu pada tahun 2019 jumlah keterwakilan perempuan di Kota Bukittinggi terjadi peningkatan dari pemilu 2019 yang hanya memperoleh 2 kursi (8%) sedangkan pada pemilu 2024 menjadi 8 kursi (32%). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi pada pemilu 2024 sudah berhasil memenuhi ambang batas minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen Berdasarkan UU No 2 Tahun 2011 (Steklov, 2023).

Jumlah perempuan kursi legislatif Kota Bukittinggi memang mengalami peningkatan Namun, dari segi kualitas keterwakilan perempuan yang baru duduk saat ini, pada dasarnya belum bisa mewakili aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar anggota DPRD Kota Bukittinggi 2024-2029 ini baru pertama kali terpilih serta belum memiliki pengalaman menjadi wakil rakyat. Dari keseluruhan keterwakilan perempuan tidak ada petahana yang terus terpilih secara berturut-turut pada 3 kali pemilu sebelumnya. Berikut ini daftar nama-nama keterwakilan perempuan yang menjabat di DPRD Kota Bukittinggi,

Tabel 1. Daftar Anggota DPRD Kota Bukittinggi Perempuan Terpilih Tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024

Tahun	Nama	Partai Pengusung
2009-2014	Hj. Nursyida, A.MaPd	Demokrat
	Ir. Hj. Aisyah	Demokrat
	Dewi Anggarini, S.E., M.M	PPP
	Dra. Hj. Hasrida KM., S.Pd	Demokrat
2014-2019	Hj. Nursyida, A.MaPd	Demokrat
	Ir. Hj. Aisyah	Demokrat
2019-2024	Hj. Rahmi Brisma	PAN
	Hj. Noni, S.Sos	PAN
2024-2029	Berliana Betris, S.IP	Golkar
	Neni Anita, S.H.	Nasdem
	Apt. Linda Wardiyanti, S.Farm	PKS
	Hj. Elfianis, A.Md	Demokrat
	Zulkhairahmi, S.Ak	Gerindra
	Vina Kumala, S.E., Ak.,M.M	Demokrat
	Dewi Anggarini, S.E.,M.M	PPP
	Hj. Ir. Rahmi Brisma	PAN

(Sumber: KPU Kota Bukittinggi, 2024)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya secara keseluruhan terjadi perubahan asal partai dalam keterwakilan perempuan. Belum ada partai politik yang

benar-benar berhasil dalam mempertahankan secara konsisten kader perempuannya di DPRD Kota Bukittinggi. Dari pernyataan yang diberikan oleh beberapa masyarakat Kota Bukittinggi dapat diketahui bahwa, kebanyakan dari masyarakat dapat melihat caleg hanya pada saat musim kampanye. Caleg perempuan juga dinilai tidak terlalu pandai berinteraksi secara sosial sehingga tidak begitu dikenal oleh masyarakat baik caleg yang maju dalam pemilu hal ini dapat memunculkan pertanyaan Apakah partai politik sudah optimal untuk mengedukasi kader perempuannya dan juga masyarakat terkait politik?

Pada penyelenggaraannya partai politik belum melaksanakan fungsinya dalam memberikan pendidikan politik dengan baik. Publik cenderung kurang memahami arti penting dari pendidikan politik dan banyak dari publik yang berpandangan bahwasanya kegiatan politik hanyalah sebatas perihal urusan pemerintahan dan juga elit sehingga memunculkan sifat-sifat apatis dan mudah dibohongi. Hal ini terlihat dari banyaknya publik yang sekedar ikut-ikutan dengan tidak memahami tujuan dan program kerja calon yang berkontestasi. (Daud, 2019).

Menurut Zoer'aini (2008 dalam Arlina, 2019) perempuan menjadi tiang negara sehingga jika mayoritas perempuan memiliki karakter yang baik dapat menjadikan negara tersebut menjadi lebih baik dan begitu pula sebaliknya. Separuh jumlah perempuan Indonesia didominasi oleh perempuan sehingga dapat dioptimalkan segala potensinya dan mampu untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam bernegara berdasarkan kapabilitas dan kompetensinya. Keterlibatan perempuan pada lembaga legislatif memiliki peran yang penting mengingat banyaknya kebijakan-kebijakan yang hanya dipahami oleh kaum perempuan itu sendiri. Murdiono (2009 dalam Rahayu et al., 2021) Menjelaskan bahwasanya partisipasi perempuan dalam pembentukan kebijakan utamanya untuk merespon masalah anak dan perempuan serta kemerosotan aspek-aspek sosial harus dijadikan sebagai pertimbangan penting untuk membuat suatu kebijakan.

Untuk itu, partai politik harus melaksanakan fungsi pendidikan politik sebagai bentuk dalam mempersiapkan kader-kader perempuan terbaiknya untuk maju sebagai calon legislatif pada tiap-tiap dapil di Kota Bukittinggi. PKS dan Demokrat termasuk ke dalam partai yang berhasil memenangkan pemilu 2024 di Kota Bukittinggi. Kedua partai ini juga berhasil dalam memperoleh kursi keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif di Kota Bukittinggi. Untuk pertama kalinya pada pemilu 2024. PKS berhasil menempatkan satu kursi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi. PKS berhasil memperoleh lima kursi di DPRD Kota Bukittinggi sebanyak empat kursi untuk wakil laki-laki dan satu kursi untuk wakil perempuan. Partai Demokrat juga merupakan salah satu partai politik yang memiliki banyak pendukung di Kota Bukittinggi. Dapat dilihat dari eksistensi partai dikalangan masyarakat mulai awal berdirinya hingga saat ini. Partai Demokrat pada periode pemilihan anggota DPRD pada tahun 2009 dengan 3 orang wakil perempuan yaitu Nursyida, Aisyah dan Harsida. Kemudian 2 orang wakil perempuan pada pemilu 2014 yaitu Aisyah dan Nursyida. Pada pemilu 2024 partai demokrat juga berhasil memperoleh 2 kursi untuk keterwakilan perempuan yaitu Elfianis dan Vina Kumala (Mukarom, 2022).

Namun, terdapat permasalahan yang menyebabkan pelaksanaan pendidikan politik oleh PKS dan Demokrat dalam keterwakilan perempuan belum terlaksana secara baik. Permasalahan tersebut yaitu, Pertama, pendidikan politik yang selama ini didapatkan oleh masyarakat hanyalah berupa pengetahuan dasar yang diperoleh melalui sekolah. Kedua,

partai politik berkeharusan menyediakan wadah pendidikan politik namun tidak berjalan dengan optimal karena minimnya aktivitas partai politik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketiga, perempuan memiliki keterbatasan yang menjadi penghambat keaktifan perempuan dibidang politik. Keempat, keadaan kehidupan menyangkut pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang rendah. Kelima, keterbatasan atau hambatan dari kader partai politik selaku aktor pemberi edukasi politik secara sosial. Ke-6 perspektif negatif publik kepada politik yang menjadikan publik malas aktif dalam acara yang diadakan oleh partai politik (Mirziyoyeva, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut tujuan penelitian ini yaitu menganalisis bentuk pendidikan politik PKS dan Demokrat, menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik PKS dan Demokrat serta strategi PKS dan Demokrat dalam meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi pada Pemilu 2024. Penelitian ini diharap mampu berpengaruh signifikan kepada partai politik untuk lebih optimal dalam melaksanakan Pendidikan politik bagi kader dan masyarakat Kota Bukittinggi (Profeta, 2022).

Metodologi

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis Pendidikan Politik PKS dan Demokrat dalam Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi Pada Pemilu 2024. Lokasi penelitian ini di DPD PKS dan DPC Demokrat Kota Bukittinggi, Informan pada studi ini ditentukan melalui metode dan teknik purposive sampling yang melibatkan Ketua DPD PKS, Sekretaris DPD PKS, Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS, Ketua, sekretaris, bendahara DPC Demokrat dan masyarakat kota Bukittinggi pengumpulan data primer dilakukan dengan interview serta studi dokumentasi sementara data sekunder didapatkan melalui telaah pustaka yang akan dianalisis dengan metode pengumpulan, reduksi dan penyajian data serta pengambilan untuk memastikan kebenaran data diuji melalui metode triangulasi teknik dan sumber.

Pembahasan

Bentuk Pendidikan Politik PKS dan Demokrat

Menurut Andriansyah (2016 dalam Yuliana et al., 2022) pendidikan politik dapat dipahami sebagai kegiatan dalam memberikan pelatihan, pengajaran dan bimbingan untuk mengoptimalkan bakat dan kompetensi seseorang dengan cara dialog secara sukarela yang dilaksanakan dengan konsisten agar pihak yang menerima informasi mempunyai pemahaman untuk berdemokrasi. Tujuan dari pendidikan politik tidak lain sebagai cara mencetak kader politik terutama terkait konstelasi politik, memperoleh solusi atas permasalahan dan mencapai tujuan partai politik (Kartono 1999 dalam Handoyo & Lestari, 2017).

Menurut Kuntowijoyo (dalam Sumanto & Haryanti, 2021) menjelaskan bahwasanya pendidikan politik dapat dilakukan secara formal dan nonformal. Partai PKS dan Partai Demokrat Kota Bukittinggi melakukan fungsi pendidikan politiknya kepada kader dan masyarakat melalui beberapa kegiatan atau program. Pada pelaksanaan Pendidikan politik baik PKS dan Demokrat memiliki program yang ditujukan khusus kepada kader serta kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Secara keseluruhan kegiatan

Pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh PKS dan Demokrat ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nonformal.

PKS memiliki beberapa program atau kegiatan pendidikan politik yang berbeda antara kader dan masyarakat. Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan seperti, **Pertama**, PKS memiliki program temu kader, kegiatan ini ditujukan kepada calon-calon anggota atau kader partai berupa pemberian pemahaman terkait dengan visi misi, tujuan, dan aksi partai. **Kedua**, adanya sekolah kepemimpinan partai yang merupakan kegiatan PKS untuk kader terpilih menjadi anggota DPRD, kegiatan ini dilakukan oleh masing-masing DPD pada Tingkat kabupaten atau kota. Pada pelaksanaannya caleg terpilih akan diberikan pembekalan oleh internal partai yang sudah memiliki pengalaman dalam menjabat di pemerintahan.

Ketiga, PKS juga melaksanakan kegiatan kajian rutin yang dikelola oleh organisasi sayap perempuan PKS Kota Bukittinggi (RKI). Tujuan dari kegiatan ini untuk membentuk karakter para kader sesuai dengan syariat agama islam yang menjadi asas dari partai sehingga para kader memiliki pemahaman yang sejalan dengan partai. **Keempat**, untuk memberdayakan perempuan, PKS memberikan seminar dan pelatihan kepada kader perempuan yang tujuannya agar kader mampu berperan lebih aktif untuk proses perpolitikan baik secara lokal dan juga nasional, pada pelaksanaan dari kegiatan ini PKS mengundang pembicara dari petinggi partai sendiri yang sudah memiliki pengalaman tentang politik serta mengundang pembicara dari kalangan akademisi.

Kelima, PKS juga rutin melaksanakan diskusi dengan kader partai. Kegiatan diskusi ini dilaksanakan kapanpun dan dimanapun baik secara langsung maupun melalui FGD atau grup chat Melalui diskusi para kader memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat dan juga menambah wawasan tentang hal-hal terbaru. **Keenam**, kegiatan kampanye yang dilaksanakan pada pemilu. Pada kegiatan ini PKS memperkenalkan caleg kepada masyarakat agar memperoleh dukungan. PKS juga memberikan sosialisasi dan ajakan partisipasi pemilu kepada masyarakat. **Ketujuh**, Temu Warga, kader-kader partai menemui langsung masyarakat untuk menanyakan serta mendengar keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat. Nantinya aspirasi masyarakat ini akan dicatat serta dibahas pada diskusi internal PKS. Selanjutnya partai akan memberikan masukan terkait aspirasi ini kepada anggota DPRD fraksi PKS agar bisa dibahas atau diusulkan dalam rapat DPRD.

Kedelapan, selain kegiatan khusus kepada kader PKS juga memiliki kegiatan tujuan utamanya yaitu masyarakat berupa kegiatan sosial Terdapat berbagai macam kegiatan sosial yang telah dilakukan melalui organisasi sayap perempuan. Terdapat empat program utama RKI yaitu, RKI Peduli, kegiatannya dapat berupa pemberian bantuan seperti bagi sembako gratis maupun bazaar sembako murah kepada masyarakat. bantuan beasiswa kepada anak-anak kader maupun masyarakat yang berprestasi dan kurang mampu, kegiatan senam kader perempuan serta masyarakat dan kegiatan lainnya; Pembinaan pos ekonomi keluarga, Kegiatan pembinaan pos ekonomi keluarga ini seperti, pelatihan memasak, pelatihan menjahit, bertanam sayuran dan lainnya; Pembinaan keluarga Sejahtera, berkaitan tentang ketahanan keluarga berupa seminar parenting maupun kajian ceramah tentang upaya rumah tangga yang samawa; serta program Konsultasi Keluarga, PKS melalui RKI sendiri juga menyediakan konsultan-konsultan yang dapat membantu menguraikan permasalahan dalam keluarga atau rumah tangga para kader.

Metode pembelajaran yang digunakan oleh PKS Bukittinggi dalam pelaksanaan pendidikan politik berbentuk forum diskusi kelompok dan ceramah. Media yang digunakan sebagai sarana untuk menunjang kegiatan pendidikan politik agar lebih menarik dan efektif sekaligus sebagai alat penyebaran informasi online yaitu pemanfaatan media sosial partai, website yang dikelola oleh PKS, serta aplikasi penunjang untuk kegiatan secara online berupa zoom meeting ataupun google meet. Selain itu PKS juga memanfaatkan media cetak yang umumnya digunakan saat musim kampanye seperti baliho, selebaran atau pamflet, spanduk, maupun tulisan pada koran-koran.

Untuk meningkatkan kemampuan para kader perempuannya PKS memberikan kesempatan berupa jabatan struktural serta pelibatan dalam setiap 130 pengambilan Keputusan. Selain itu, para kader perempuan PKS memiliki kesempatan untuk lebih aktif dan dekat dengan masyarakat melalui kegiatan yang dilakukan oleh RKI. Organisasi sayap perempuan ini dapat dimanfaatkan oleh kader perempuan untuk membangun citra politik melalui kontribusi langsung pada setiap kegiatan bersama masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik dari partai demokrat Kota Bukittinggi ini umumnya menyesuaikan kebutuhan dari para kader dan partai. Sebagian besar dari kegiatan pendidikan politik Demokrat yang diberikan kepada kader-kadernya yaitu melalui pemanfaatan event maupun moment tertentu. Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik Demokrat Bukittinggi itu terbagi ada yang khusus untuk kader ada juga yang bersama masyarakat. Bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPC Demokrat Kota Bukittinggi kepada kader perempuan seperti, **Pertama**, kegiatan pembekalan kader, pembekalan ini diberikan oleh struktural Partai kepada kader perempuan baru yang dilaksanakan sebelum musim pemilu. Materi yang diberikan berupa pemahaman nilai-nilai dan moral sebagai calon pemimpin, pengenalan citra diri partai, strategi berkomunikasi dengan masyarakat, peran posisi perempuan di bidang politik, dan sebagainya.

Kedua, Pembekalan Dewan Terpilih, diberikan kepada kader yang terpilih pada saat pemilihan baik dalam pemilu maupun pilkada berupa strategi dalam mewujudkan visi dan misi, kepemimpinan, serta pembekalan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Pembekalan ini diberikan langsung oleh internal partai yang sudah berpengalaman dalam menjabat. **Ketiga**, kegiatan seminar yang bertujuan untuk mendiskusikan dan mempelajari berbagai isu politik dengan melibatkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. **Keempat**, Demokrat juga rutin melakukan kegiatan diskusi secara langsung dapat dilakukan pada setiap pertemuan atau kegiatan ataupun melalui FGD, melalui diskusi para kader perempuan bisa memberikan tanggapan atau ide baru yang nantinya bisa dikembangkan oleh partai.

Kelima, terdapat kegiatan partai demokrat yang melibatkan masyarakat yaitu pada masa kampanye. Pada saat kampanye partai demokrat akan memperkenalkan dan memberikan kesempatan kepada para kader untuk berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, partai juga akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan pemilu. **Keenam**, kegiatan partai lainnya yang melibatkan masyarakat yaitu pada kegiatan sosial. Umumnya para kader perempuan atau organisasi sayap perempuan demokrat (PRDI) memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial partai bersama dengan masyarakat seperti, pemberian tunjangan kepada garin masjid/musholla serta guru ngaji dan pondok pesantren, pemberian bantuan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi.

acara senam para kader dan masyarakat, acara temu masyarakat, acara olahraga melibatkan generasi muda.

Partai Demokrat juga memanfaatkan media sebagai pendukung pendidikan politik. Media digunakan untuk komunikasi agar kegiatan lebih efisien dan efektif, seperti media sosial, website partai, platform diskusi online seperti zoom, dan google meet. Dalam memberikan pendidikan politik umumnya diberikan oleh internal partai demokrat yang sudah memiliki pengalaman dalam pemerintahan. Selain itu, Partai Demokrat Kota Bukittinggi memiliki organisasi sayap perempuan yang bernama Perempuan Demokrat Indonesia (PDRI). Kegiatan PDRI ini umumnya berupa kegiatan seminar serta kegiatan sosial.

Terdapat perbedaan dari PKS dan Demokrat dalam melaksanakan pendidikan politik. Masing-masing partai telah memiliki bentuk program serta kegiatan yang telah dilaksanakan. Secara sederhana dapat dilihat perbandingan dari bentuk program atau kegiatan pendidikan politik kepada kader perempuan dan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh PKS dan Demokrat Kota Bukittinggi dalam tabel perbandingan berikut ini:

Tabel 2. Perbandingan Pendidikan Politik PKS dan Demokrat

No	Sasaran/Tujuan Pendidikan Politik	Program atau Kegiatan Partai	
		PKS	Demokrat
1.	Rekrutmen Kader Partai	1) Temu Kader	1) Pembekalan Kader
2.	Kader dalam Kegiatan Partai	1) Kajian Rutin, 2) Seminar atau pelatihan 3) Diskusi	1) Seminar 2) Diskusi
3.	Kader dalam organisasi sayap	Kegiatan Sosial RKI 1) RKI Peduli 2) Pembinaan Pos Ekonomi Keluarga, 3) Pembinaan Keluarga Sejahtera 4) Konsultasi Keluarga,	Kegiatan Sosial PDRI 1) Bagi-bagi sembako, 2) Pemberian tunjangan kepada garin masjid/musholla serta guru ngaji dan pondok pesantren 3) Pemberian bantuan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi. 4) Acara senam 5) Acara temu masyarakat. 6) Acara olahraga
4.	Caleg terpilih pada pemilu	1) Sekolah kepemimpinan partai,	1) Pembekalan Dewan Terpilih
5.	Kader dan Masyarakat pada Pemilu	1) Kampanye 2) Temu Warga	1) Kampanye.

(Sumber: Olahan Peneliti dari Hasil Penelitian, 2024)

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, DPD PKS Kota Bukittinggi dalam pendidikan politik memiliki beberapa kegiatan pendidikan politik seperti, temu kader yang ditujukan kepada kader baru partai; kegiatan kajian rutin, seminar atau pelatihan serta diskusi yang dilaksanakan bagi internal partai; kegiatan sosial yang dilaksanakan secara rutin melibatkan RKI selaku organisasi sayap perempuan terdiri dari empat program utama meliputi, RKI Peduli, Pembinaan Pos Ekonomi Keluarga, Pembinaan Keluarga Sejahtera dan konsultasi bagi keluarga; sekolah kepemimpinan partai untuk caleg terpilih; serta kegiatan kampanye dan temu warga yang dilaksanakan pada musim pemilu.

Sedangkan DPC Demokrat Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pendidikan politik memiliki kegiatan pembekalan kader bagi kader baru; seminar dan diskusi bagi internal partai; kegiatan sosial melibatkan PDRI selaku organisasi sayap perempuan seperti, bagi sembako, bantuan beasiswa, bantuan tunjangan, temu masyarakat dan kegiatan olahraga dimana kegiatan ini hanya dilakukan sesekali atau tidak rutin; kemudian kegiatan pembekalan bagi caleg terpilih; serta kegiatan kampanye yang dilaksanakan pada musim pemilu.

Dapat disimpulkan juga bahwa Partai Keadilan Sejahtera memiliki bentuk kegiatan pendidikan politik yang lebih rutin, variatif dan terstruktur dibandingkan dengan kegiatan Partai Demokrat yang berupa pemanfaatan event atau momen-momen pada acara tertentu. Sehingga pada pemilu 2024 PKS sudah berhasil memperoleh 1 kursi keterwakilan perempuan. Meskipun partai demokrat kurang aktif dalam melaksanakan pendidikan politik, tetapi pada pemilu 2024 partai demokrat berhasil memiliki 2 kursi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi. Selain itu, berdasarkan hasil 4 kali pelaksanaan pemilu yaitu pada tahun 2009, 2014, 2019, dan pemilu 2024, partai demokrat sudah berhasil menempatkan wakil perempuannya di DPRD Kota Bukittinggi sebanyak 3 kali. Pada pemilu 2009 Demokrat berhasil memperoleh 3 kursi, pemilu 2014 dengan 2 kursi dan pada pemilu 2024 demokrat berhasil mendapatkan 2 kursi keterwakilan perempuan. Sedangkan PKS baru pada tahun 2024 memiliki 1 orang wakil perempuan di DPRD Kota Bukittinggi.

Hambatan pendidikan politik PKS dan Demokrat

Terdapat kendala terkait implementasi pendidikan politik oleh PKS dan Demokrat baik secara internal partai maupun eksternal di luar partai. (dalam Kartono, 2009).

1. Hambatan Internal

a) Keterbatasan Sumber Daya

Pelaksanaan pendidikan politik oleh DPD PKS Kota Bukittinggi mencangkup kurangnya SDM dan kemampuan finansial yang masih terkendala serta infrastruktur yang belum memadai. Sedangkan DPC Demokrat Kota Bukittinggi memiliki hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia serta hambatan finansial dalam melaksanakan kegiatan pendidikan politik. Hambatan tersebut mengakibatkan partai PKS dan Demokrat belum mampu untuk melaksanakan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat secara rutin.

b) Ketidakjelasan target

PKS dan Demokrat belum memiliki target yang jelas untuk menjalankan fungsi partai melaksanakan pendidikan politik untuk kader dan publik. Karena partai terlalu fokus kepada tujuan utama yaitu memperoleh dukungan yang diberikan oleh

masyarakat pada saat pemilu. Partai tidak terlalu memperhatikan kesesuaian program atau kegiatan pendidikan politik dengan kebutuhan masyarakat.

c) Kurangnya komitmen dan koordinasi

PKS dan Demokrat masih kurang memiliki komitmen serta koordinasi yang baik. Sehingga pendidikan politik yang dilaksanakan belum secara optimal. Kurangnya komitmen serta koordinasi partai dalam melaksanakan pendidikan politik ini juga dipengaruhi oleh hambatan lain seperti kurangnya sumber daya serta tujuan atau prioritas yang ingin dicapai oleh partai.

2. Hambatan Eksternal

a) Sikap apatis masyarakat

Kurangnya keinginan publik terlibat aktivitas kepartaian. Apatisme politik masyarakat yang diakibatkan oleh pemahaman yang terbatas tentang pentingnya politik serta rendahnya elektabilitas terhadap sistem merupakan penghalang utama dalam implementasi pendidikan politik.

b) Ekonomi masyarakat yang rendah

Masyarakat lebih memprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kesibukan masyarakat membuat masyarakat tidak terlalu mepedulikan perkembangan politik jika tidak dalam musim pemilu.

c) Pendidikan dan budaya literasi masyarakat masih rendah

Pendidikan yang rendah ini mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membaca. Kebanyakan dari masyarakat memiliki budaya literasi yang rendah atau malas membaca. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat mudah termakan hoaks dikarenakan masyarakat tidak mau membaca dan mencari tau lebih dalam tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan perkembangan politik.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa, hambatan internal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan politik oleh PKS dan Demokrat yaitu partai masih kurang memiliki komitmen serta koordinasi yang baik. Sehingga pendidikan politik yang dilaksanakan belum secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh partai yang terlalu fokus untuk mencari dukungan dari masyarakat agar menang dalam pemilu. Untuk memenuhi tujuan tersebut partai politik hanya sering membuat kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat berupa kegiatan sosial yang disertai dengan kampanye. Kurangnya komitmen serta koordinasi partai dalam melaksanakan pendidikan politik ini juga dipengaruhi oleh hambatan lain seperti kurangnya sumber daya serta tujuan atau prioritas yang ingin dicapai oleh partai. Hambatan eksternal PKS dan Demokrat Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat yaitu sikap apatis, perekonomian, serta pendidikan dan budaya literasi masyarakat yang cenderung rendah. Mengakibatkan kecenderungan dari masyarakat yang tidak memahami isu-isu politik, mudah dipengaruhi hoaks, serta kurangnya keinginan berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik. Sehingga menyebabkan pendidikan politik tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Strategi PKS dan Demokrat dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Menurut Warjiyati, (dalam Kiftiyah, 2019) perempuan memiliki hak terlibat aktif secara sosial politik dan memiliki pengaruh besar dalam terciptanya suatu produk

kebijakan. Peningkatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif tidak terlepas dari modal yang dimiliki oleh caleg agar dapat terpilih dalam pemilu. Menurut Bourdieu (1986) (dalam Magriasti, 2021) terdapat empat modal keterpilihan yaitu, modal sosial yang berkaitan dengan relasi, modal politik seperti pengalaman dalam berorganisasi, modal ekonomi merujuk pada kemampuan finansial, dan modal simbolik yang berkaitan dengan simbol yang melekat pada diri caleg seperti gelar pendidikan.

Partai politik dapat mengatur strategi untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik (Ikmal dan Arifin, 2019). Strategi politik bertujuan agar dapat tercapai visi politik terutama secara jangka panjang. Perancangan strategi ialah analisis secara komprehensif untuk merumuskan visi, opsi dan respon dalam menetapkan instruksi dan menerapkan kebijakan dengan logis. (Schoder, 2008). Strategi yang dilakukan oleh PKS dan Demokrat dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi pada Pemilu 2024, yaitu:

1. Memberikan nomor urut awal kepada caleg perempuan

PKS dan Demokrat memberikan nomor urut awal kepada calon legislatif Perempuan. Hal ini merupakan strategi efektif yang dapat dilakukan oleh partai politik guna mengoptimalkan representasi perempuan secara legislatif. Langkah ini didasari pada asumsi bahwa calon yang menempati urutan awal dalam daftar calon memiliki keunggulan dalam hal keterpilihan.

2. Mempersiapkan strategi kemenangan bagi caleg perempuan

PKS memiliki beberapa strategi khusus untuk memenangkan caleg perempuan, meliputi promosi caleg perempuan pada setiap kegiatan kampanye, memanfaatkan beberapa media dalam promosi caleg perempuan di baliho, kalender maupun media sosial, serta memperkenalkan kader kepada masyarakat sebelum musim pemilu melalui berbagai kegiatan yang diadakan sebelum pemilu. Namun, Partai Demokrat Kota Bukittinggi tidak memberikan strategi kemenangan khusus untuk caleg perempuan. Untuk mempromosikan calegnya demokrat memberikan perlakuan yang sama untuk semua caleg.

3. Mengikutsertakan kader pada setiap kegiatan partai

Partai politik melibatkan kader perempuan dalam segala aspek kegiatan partai, seperti jabatan struktural pengambilan Keputusan dan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam berkontribusi di bidang politik.

4. Sistem rekrutmen yang baik

Melalui proses pemilihan calon caleg perempuan dengan sangat selektif. PKS dan Demokrat mencari kader perempuan yang memiliki kualifikasi lengkap, mulai dari pendidikan yang tinggi, pengalaman kerja atau aktivitas sosial yang relevan, serta dedikasi yang kuat terhadap partai.

5. Memberikan Pendidikan politik bagi perempuan

Strategi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pembekalan kepada caleg sehingga mempunyai wawasan dan kompetensi dalam mengemban tugas sebagai anggota DPRD jika terpilih.

Berdasarkan pemaparan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwasanya ada berbagai strategi yang dipersiapkan PKS dan Demokrat untuk mengoptimalkan keterlibatan perempuan secara Legislatif dalam pemilu mulai dari, pemberian nomor urut awal kepada caleg perempuan. Baik PKS dan Demokrat sama-sama memberikan nomor urut awal agar caleg perempuannya lebih menonjol dan mudah diingat oleh masyarakat sehingga nantinya caleg perempuan dapat memperoleh suara yang banyak dalam pemilu.

PKS memiliki beberapa strategi khusus yang dipersiapkan untuk caleg perempuan, sedangkan partai demokrat tidak mempersiapkan strategi khusus untuk caleg perempuannya. Langkah selanjutnya yang dilakukan baik PKS maupun Demokrat agar kader perempuannya memiliki kesiapan untuk mencalonkan diri yaitu memberikan kesempatan bagi kader untuk menjabat dalam struktural partai agar memiliki jiwa kepemimpinan serta melalui pelibatan kader perempuan pada seluruh kegiatan partai sehingga kader terlatih dalam mengambil keputusan.

Selain itu, upaya yang dilakukan PKS dan Demokrat agar memiliki kader yang berkualitas melalui proses sistem rekrutmen yang bersifat selektif. PKS dan Demokrat mencari kader perempuan yang memiliki kualifikasi lengkap serta sesuai dengan kriteria partai masing-masing. Kemudian, dalam mempersiapkan kadernya PKS dan Demokrat melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi kader perempuan. Strategi-strategi tersebut dilaksanakan oleh PKS dan Demokrat dengan tujuan agar berhasil memperoleh kursi bagi keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bukittinggi.

Simpulan

Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya bentuk pendidikan politik dari PKS dan Demokrat kepada kader dan masyarakat lebih cenderung pada kegiatan nonformal. PKS Pada pelaksanaan pendidikan politik memiliki kegiatan yang lebih variatif dan struktural terdapat kegiatan yang ditujukan khusus kepada kader seperti, kegiatan temu kader, sekolah kepemimpinan partai, seminar dan pelatihan kader, dan kegiatan diskusi partai. Kegiatan yang melibatkan masyarakat yaitu, kegiatan kampanye, kajian rutin serta kegiatan sosial. Organisasi sayap perempuan PKS programnya meliputi, RKI peduli, Pembinaan Pos Ekonomi Keluarga, Pembinaan Keluarga Sejahtera, dan Konsultasi Keluarga. Sedangkan Partai Demokrat memberikan pendidikan politik melalui pemanfaatan event atau kegiatan serta moment-moment tertentu. Kegiatan pendidikan politik yang ditujukan kepada kader berupa pembekalan, seminar, serta kegiatan diskusi partai demokrat. Adapun kegiatan pendidikan politik yang melibatkan masyarakat yaitu kegiatan kampanye dan kegiatan sosial yang melibatkan organisasi sayap perempuan yaitu PDRI. Hambatan Pendidikan Politik PKS dan Demokrat meliputi hambatan internal yang berasal dari dalam partai serta hambatan eksternal yang berasal dari luar partai seperti hambatan yang berasal dari Masyarakat. Strategi PKS dan Demokrat Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Bukittinggi Pada Pemilu 2024 yaitu, Memberikan nomor urut awal kepada caleg perempuan, Mempersiapkan strategi kemenangan bagi caleg perempuan, Mengikutsertakan kader pada kegiatan partai, Sistem rekrutmen yang baik, serta Memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

Daftar Pustaka

- Arlina, F. (2019). Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 7 (4), 1707–1718. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Jurnal%20Feni%20Arlina%20\(11-25-19-02-16-45\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/11/Jurnal%20Feni%20Arlina%20(11-25-19-02-16-45).pdf)
- Daud, M. D. (2019). *Partai Politik Dan Pendidikan Politik Studi Atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan* [Thesis] UIN Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49236>
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik* (1st ed.). Penerbit Pohon Cahaya. www.pohoncahaya.com
- Heriyanti, Dermawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74–85. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/index>
- Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), 67–85. <https://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia>
- Kadir, A., & Safriani, A. (2021). Implementasi Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Takalar. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume, 3, 28–35.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa* (3rd ed.). CV. Mandar Maju.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 1–13. Available at: <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp1-13>
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)* (1st ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Magriasti, L. (2021). *Representasi Politik Perempuan Di Tingkat Lokal (Studi Pada Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Padang Dan Kota Tanjungpinang Periode 2014-2019)*. [Disertasi]. Universitas Indonesia.
- Mirziyoyeva, Z. (2023). Does representation of women in parliament promote economic growth? Considering evidence from Europe and Central Asia. *Frontiers in Political Science*, 5. <https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1120287>
- Mukarom, Z. (2022). Political Communication Strategies to Increase the Opportunity of Women's Political Representation in Indonesian Parliament. *Journal of International Women's Studies*, 23(1). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85135719032&origin=inward>
- Profeta, P. (2022). Electoral Rules, Women's Representation and the Qualification of Politicians. *Comparative Political Studies*, 55(9), 1471–1500. <https://doi.org/10.1177/00104140211047414>
- Rahayu, S., Nasution, A., & Saleh, A. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterpilihan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Pemilu 2019. *PERSPEKTIF*, 10(2), 424–440. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.4603>

-
- Schoder, P. (2008). *Strategi Politik (Politische Strategiein)* (D. J. Matindas & I. Dayasih, Eds.). Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit.
- Sumanto, D., & Haryanti, A. (2021). *Pendidikan Politik* (Alinurdin & P. S. Permana, Eds.; 1st ed.). Unpam Press. Available at: www.unpam.ac.id
- White, S. (2023). Voting against Women: Political Patriarchy, Islam, and Representation in Indonesia. *Politics and Gender*. <https://doi.org/10.1017/S1743923X23000648>
- Yuliana, Y. Y., Adityawarman, & S, A. N. S. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Upaya Mendukung Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat Di Kabupaten Pangandaran. *Unigal Repository*, 02, 3620–3629. <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/2291>
- Yuliana, Y. Y., Adityawarman, & S, A. N. S. (2022). Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Upaya Mendukung Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Masyarakat Di Kabupaten Pangandaran. *Unigal Repository*, 02, 3620–3629. <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/2291>
-